

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL, PEMANFAATAN SISTEM  
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, DAN IMPLEMENTASI  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Rifka Dwi Apriliani<sup>1</sup>; Hadi Sasana<sup>2</sup>; Endang Kartini Panggiarti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar Magelang, 56116,  
Indonesia*

[rifkaapriliani14@gmail.com](mailto:rifkaapriliani14@gmail.com)

**Abstract**

*Magelang Regency obtained an opinion or opinion with an exception (WDP) during the years 2012-2015. Then in 2016 the Magelang Regency Government obtained an Unqualified Opinion or Opinion (WTP) and that opinion could be maintained until 2020. Along with these achievements, there are problems faced by the Magelang Regency Government. This study uses a quantitative approach using primary data sourced from respondents at the OPD Magelang Regency. The sampling technique in this study was using purposive sampling. The sample in this study were 27 OPD in Magelang Regency. The results of data analysis in this study are 1) Human Resource Competence has no positive and significant effect on the quality of financial reports; 2) Internal Control System has no positive and significant effect on the quality of financial reports; 3) Utilization of the Regional Financial Accounting System has a positive and significant effect on the quality of financial reports; 4) Implementation of Government Accounting Standards does not have a positive and significant effect on the quality of financial reports.*

**Keywords:** *Human Resource Competence, Internal Control System, Regional Financial Accounting System, Government Accounting Standards, Quality of Financial Reports.*

**Abstrak**

Kabupaten Magelang memperoleh opini atau pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tahun 2012-2015. Kemudian ada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Magelang memperoleh opini atau pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan opini tersebut dapat dipertahankan hingga tahun 2020. Seiring dengan pencapaian tersebut, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer bersumber dari responden pada OPD Kabupaten Magelang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling*. Sampel pada penelitian ini yaitu 27 OPD di Kabupaten Magelang. Hasil analisa data pada penelitian ini yaitu 1) Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; 2) Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; 3) Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; 4) Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

**Kata Kunci :** *Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan.*

**PENDAHULUAN**

Organisasi sektor publik atau pemerintahan merupakan suatu organisasi yang kepemilikannya dinaungi oleh pemerintah yang memiliki tanggungjawab guna melayani kepentingan masyarakat umum atau publik dalam berbagai sektor seperti pendidikan, perekonomian, kesehatan, keamanan, dan berbagai sektor lainnya. Dalam pelaksanaannya organisasi sektor publik atau pemerintahan salah satunya dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban dalam sektor pengelolaan keuangan. Akuntabilitas yang dituntut oleh masyarakat umum baik pihak pusat maupun daerah. Akuntabilitas tersebut dapat tercapai jika dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat menyajikan laporan yang berkualitas, berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku, menyusun dan menyajikan laporan dengan tepat waktu.

Laporan keuangan adalah *output* dari suatu kegiatan akuntansi dengan tujuan untuk pertanggungjawaban, oleh karena itu dalam menyajikan laporan keuangan wajib berpedoman pada prinsip akuntansi yang berlaku umum, diungkapkan dengan wajar, serta tepat waktu. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, dimana standar akuntansi pemerintahan yang telah dibakukan oleh peraturan pemerintah harus diimplementasikan dalam bentuk serta inti laporan pertanggungjawaban atas aktualisasi APBN/APBD (Bastian, 2010).

Pembendaharaan Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah sebagai pelaku entitas pelaporan publik memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah terhadap pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas publik dituntut untuk menyajikan informasi keuangan dari suatu organisasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam menentukan suatu sikap serta guna mencapai misi tertentu (Sujarweni, 2015 : 88).

Laporan keuangan yang dipublikasikan pemerintah daerah tersebut diandalkan oleh banyak orang yang memiliki kepentingan dalam mengambil sikap, sehingga pemerintah harus menyajikan laporan keuangan yang baik. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan digunakan oleh masyarakat, wakil rakyat, lembaga penyelidik, serta pihak yang berkaitan dalam kegiatan investasi, hutang, sumbangan, dan digunakan oleh pemerintah tersebut.

Pemerintah baik pusat ataupun daerah agar tidak terjadi perbedaan dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan harus menggunakan dasar sebagai acuan yaitu prinsip akuntansi yang memiliki kekuatan hukum tertuang dalam SAP. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dan disebut dengan SAP merupakan ganti dari PP Nomor 24 Tahun 2005. Dengan pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sendiri

mempermudah pemerintah dalam melakukan penyusunan serta pertanggungjawaban laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dibuat dan disajikan oleh pemerintah daerah terkait, pada tahun ke tahun akan diberi pendapat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk opini. Opini merupakan pernyataan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kualitas serta kewajaran LKPD yang dibuat pemerintah daerah. Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengeluarkan atau memberikan opini diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang bertujuan untuk berpendapat atau beropini terkait dengan kewajaran serta kualitas laporan keuangan yang telah disajikan, serta mempertimbangkan empat aspek yaitu : (1) efektivitas dari sistem pengendalian internal (SPI), (2) kepatuhan dalam penyajian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) kecukupan informasi dalam pengungkapan (*disclosure*), (4) keselarasan penyusunan laporan keuangan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari laman Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Jateng, Kabupaten Magelang memperoleh opini atau pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tahun 2012-2015. Kemudian pada tahun 2016

Pemerintah Kabupaten Magelang memperoleh opini atau pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta dapat mempertahankan pendapat tersebut hingga tahun 2020. Dengan hal ini dapat diketahui bahwa Kabupaten Magelang menyajikan dan mengungkapkan LKPD dengan wajar dan berkualitas.

Disamping itu terdapat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Magelang, berdasarkan ringkasan APBD terdapat defisit anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp 92.327.253.600,00 ([ppid.magelangkab.go.id](http://ppid.magelangkab.go.id)). Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Akhir Triwulan III Tahun Anggaran 2020 disebutkan bahwa hingga akhir triwulan III tahun 2020, realisasi kegiatan APBD Kabupaten Magelang, baik fisik maupun keuangan dimana hingga triwulan tahun 2020 masih rendah. Kemudian capaian kinerja pemerintah Kabupaten Magelang baik secara fisik ataupun keuangan hingga triwulan ketiga tahun 2020 belum memenuhi target yang ditetapkan. Realisasi fisik belanja langsung yang masih belum mencapai target yaitu 68,43 persen dari target sebesar 75,22 persen. Hingga serapan anggaran juga mengalami kesenjangan yang cukup besar antara realisasi dengan anggaran. Realisasi keuangan belanja langsung hingga 15 Oktober 2020 sebesar 71,09 persen, sehingga terjadi kesenjangan sebesar 31,59 persen ([antaranews.com](http://antaranews.com), 22 Oktober 2020).

Berdasarkan pendapat dari Rasdianto (2013) dijelaskan LKPD merupakan sebuah output dari kegiatan mengidentifikasi, mengukur, mencatat mengenai transaksi yang telah terjadi dan dikelola oleh pihak entitas akuntansi dalam lingkup pemerintah, yang kemudian disajikan menjadi informasi keuangan oleh entitas akuntansi sebagai bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, sehingga bermanfaat sebagai bahan mengambil keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas jika informasi yang termuat di dalamnya relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Di mana laporan keuangan tersebut dikelola oleh sumber daya manusia yang berkompentensi, dan kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), serta kemampuan (*ability*) yang akan berpengaruh terhadap cara seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya, hal tersebut dikemukakan oleh Havesi, (2005) dalam Indriasari & Ertambang Nahartyo (2008), dalam Soimah (2014). Dalam mencapai suatu laporan keuangan yang berkualitas diperlukan adanya sistem pengendalian internal, dan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai alat pendukung dalam menyajikan laporan keuangan yang harus digunakan agar laporan keuangan tersebut dapat disajikan dengan tepat waktu.

**METODE PENELITIAN**

Deskriptif kuantitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Terdapat

lima variabel dalam penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen (Y), dan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah, implementasi standar akuntansi pemerintahan sebagai variabel independen (X). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner dan pengolahan data menggunakan analisis regresi linear berganda.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Instrumen Penelitian**

1. Uji Validitas

**Tabel 1.** Hasil Uji Validitas

Variabel	Pearson Correlation	R tabel	Hasil
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	0,603	0,2441	Valid
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0,471	0,2441	Valid
Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3)	0,600	0,2441	Valid
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (X4)	0,557	0,2441	Valid
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,598	0,2441	Valid

Sumber : Data Output SPSS Versi 26 Diolah, 2021

Diketahui bahwa semua instrumen pertanyaan setiap variabel memberikan hasil t hitung dilihat dari nilai *pearson correlation* yang lebih besar dari t tabel dengan nilai 0,2441. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen pertanyaan setiap variabel adalah valid. Sehingga data yang diperoleh dari kuisioner yang diisi oleh setiap responden

layak untuk dijadikan sebagai alat ukur penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronchbach's Alpha	Hasil
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,710	Reliable
Sistem Pengendalian Internal	0,734	Reliable
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,748	Reliable
Standar Akuntansi Pemerintahan	0,680	Reliable
Kualitas Laporan Keuangan	0,704	Reliable

Sumber : Data Output SPSS Versi 26 Diolah, 2021 Berdasarkan uji reliabilitas yang telah dilaksanakan memberikan hasil *Cronchbach's Alpha* lebih dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini reliable.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		65
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.27315600
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.061
	Negative	-.065
Test Statistics		.065
Asymp.Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber : Data Output SPSS Versi 26 Diolah, 2021 Model regresi dikatakan normal jika nilai sig (2-tailed) > 5%. Hasil uji normalitas diatas didapat nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 (20,0%) >  $\alpha$  5%. Hasil ini

mengindikasikan bahwa model regresi berganda memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficient <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistic	
		Tolerance	VIF
1	Kompetensi Sumber Daya Manusia	.932	1.073
	Sistem Pengendalian Internal	.563	1.775
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.483	2.076
	Standar Akuntansi Pemerintahan	.716	1.397
	a. Dependent Variabel : Kualitas Laporan Keuangan		

Sumber : Data Output SPSS Versi 26 Diolah, 2021 Dapat diketahui bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah, dan standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai *VIF* < 10. Variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,932 dan nilai *VIF* sebesar 1,073. Pada variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,563 dan nilai *VIF* sebesar 1,775. Pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,483 dan nilai *VIF* sebesar 2,076. Sedangkan pada variabel standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,716 dan nilai *VIF* sebesar 1,397. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini lolos uji multikolinearitas atau tidak terjadi multikolinearitas, sehingga tidak terdapat satu

atau lebih variabel independent (bebas) yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya secara linear.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

Coefficient <sup>a</sup>						
Model		Undstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-.696	2.709		-.257	.798
	Kompetensi SDM	.075	.044	.221	1.693	.096
	SPI	-.026	.067	-.076	-.452	.653
	SAKD	.000	.077	.000	.002	.999
	SAP	.034	.068	.075	.501	.618
a. Dependent Variable : ABRESID						

Sumber : Data Output SPSS Versi 26 Diolah, 2021

Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi tiap variabel penelitian lebih besar dari 0,05. Nilai signifikansi dari variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,096. Nilai signifikansi pada variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,653. Nilai signifikansi pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,999. Dan nilai signifikansi pada standar akuntansi pemerintahan sebesar 0,618. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficient <sup>a</sup>			
Model		Undstandardized Coefficient	
		Standardized Coefficient	

		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-3.665	4.758		-.770	.444
	Kompetensi SDM	-.087	.077	-.095	-1.123	.266
	SPI	.088	.101	.096	.875	.385
	SAKD	.730	.135	.637	5.390	.000
	SAP	.170	.119	.138	1.427	.160
a. Dependent Variable : Kualitas Laporan Keuangan						

Sumber : Data Output SPSS Versi 26 Diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda di atas dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = - 3,665 - 0,087_{(Kompetensi\ SDM)} + 0,088_{(SPI)} + 0,730_{(SAKD)} + 0,170_{(SAP)}$$

Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda tersebut yaitu :

- Nilai konstanta dalam penelitian ini sebesar - 3,665 yang menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Internal (SPI), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) jika variabel-variabel tersebut 0, maka kualitas laporan keuangan memiliki nilai sebesar - 3,665.
- Nilai koefisien Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) ( $\beta_1$ ) sebesar -0,087 dengan nilai negatif yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebesar 1 kali, maka kualitas laporan keuangan akan menurun sebesar -0,087 dengan asumsi variabel yang lain adalah konstan.
- Nilai koefisien Sistem Pengendalian Internal (SPI) ( $\beta_2$ ) sebesar 0,088 dengan nilai positif

yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan sistem pengendalian internal sebesar 1 kali, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,088 dengan asumsi variabel lain adalah konstan.

- d. Nilai koefisien Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) ( $\beta_3$ ) sebesar 0,730 dengan nilai positif yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 1 kali, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,730 dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
- e. Nilai koefisien Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ( $\beta_4$ ) sebesar 0,170 dengan nilai positif yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan standar akuntansi pemerintahan sebesar 1 kali, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,170 dengan asumsi variabel lain adalah konstan.

**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Tabel 7.** Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.772 <sup>a</sup>	.596	.569	1.315
a. Predictors : (Constant) : Kompetensi SDM, SPI, SAKD, SAP b. Dependent Variabel : Kualitas Laporan Keuangan				

Sumber : Data Output SPSS Versi 26 Diolah, 2021

Hasil uji koefisien determinasi di atas, dapat diketahui bahwa nilai ( $R^2$ ) sebesar 0,569 atau 56,9%. Sehingga dapat diketahui bahwa variabel dependen yaitu kualitas laporan

keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Internal yang dirumuskan dalam SPI, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebesar 56,9%, sedangkan sisanya yaitu 43,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini.

**Uji Hipotesis**

- a. Pengaruh Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai t hitung -1,123 di mana angka tersebut lebih kecil dari t tabel yaitu 0,2500 (t hitung < t tabel). Sedangkan nilai signifikansi 0,266 (>0,05). Dengan demikian dapat diketahui bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga hasil pada pengujian ini dapat disimpulkan bahwa H1 tidak didukung.
- b. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai t hitung sebesar 0,875 di mana angka tersebut lebih besar dari t tabel yaitu 0,2500 (t hitung > t tabel), dengan nilai signifikansi 0,385 (>0,05). Dengan demikian dapat diketahui sistem

pengendalian internal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga hasil pada pengujian ini dapat disimpulkan H2 tidak didukung.

c. Pengaruh Variabel Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai t hitung sebesar 5,390 di mana angka tersebut lebih besar dari t tabel yaitu 0,2500 (t hitung > t tabel), dengan nilai signifikansi 0,000 (<0,05). Sehingga dapat diketahui bahwa pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H3 didukung.

d. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel standar akuntansi pemerintah memiliki nilai t hitung sebesar 1,427 di mana angka ini lebih besar dari t tabel yaitu 0,2500 (t hitung > t tabel), dengan nilai signifikansi 0,160 (>0,05). Sehingga dapat diketahui bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H4 tidak didukung.

**Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15.815	4	28.204	22.096	.000 <sup>b</sup>
	Residual	103.739	60	1.729		
	Total	256.554	64			

a. Dependent Variable : Kualitas Laporan Keuangan  
b. Predictors : (Constant), Kompetensi SDM, SPI, SAKD, SAP

Sumber : Data Output SPSS Versi 26 Diolah, 2021

Dalam pengujian ini membandingkan nilai F hitung 22,096 dengan F tabel 2,525 (F hitung > F Tabel), kemudian nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika diuji secara bersamaan hipotesis variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah, dan implementasi standar akuntansi keuangan berpengaruh simultan dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan tepat (*fit*).

**Pembahasan dan Hasil Penelitian**

a. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang

Berdasarkan uji t yang telah dilakukan diketahui kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai t hitung sebesar -1,123 di mana angka tersebut lebih kecil dari t tabel yaitu 0,2500 (t hitung < t tabel), sedangkan nilai signifikansi lebih

besar dari nilai  $\alpha$  yaitu 0,266 ( $>0,05$ ) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga H1 tidak didukung. Jika dilihat dari nilai koefisien t hitung pada variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar -1,123 yang artinya tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dikarenakan masih minimnya kualitas sumber daya manusia yang mengelola laporan keuangan.

Dalam melaksanakan penelitian dengan menyebar kuisioner, peneliti memberikan arahan kepada setiap OPD mengenai pihak yang mengisi kuisioner berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi pada hasilnya diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini dapat disebabkan karena sumber daya yang melaksanakan pengelolaan keuangan sebanyak 72,3% bukan dari jurusan akuntansi sehingga memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang berkualitas. Selain itu berdasarkan dengan hasil rekapitulasi jawaban responden, dapat diketahui bahwa masih minimnya pemahaman sumber daya manusia tentang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Kemudian kemampuan dari responden

dalam membuat jurnal untuk setiap transaksi masih cukup rendah, dan masih minimnya pemahaman responden terkait dengan prosedur dan proses akuntansi dengan baik.

Nilai Adjusted R Square sebesar 56,9%. Sehingga dapat diartikan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam penelitian ini sebesar 56,9% sedangkan 43,1% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nadir & Hasyim (2017) yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Barru hal ini dikarenakan aparatur pemerintah belum memahami standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan sepenuhnya.

#### b. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang

Berdasarkan uji T yang telah dilakukan, sistem pengendalian internal memiliki nilai t hitung sebesar 0,875 di mana angka tersebut lebih besar dari t tabel yaitu 0,2500 ( $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ), hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan jika dilihat dari nilai signifikansi lebih besar dari nilai  $\alpha$  yaitu 0,385 ( $>0,05$ ),

sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan begitu dapat diketahui bahwa H2 tidak didukung.

Dalam melaksanakan penelitian dengan menyebar kuisisioner, peneliti memberikan arahan kepada setiap OPD mengenai pihak yang mengisi kuisisioner berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. H2 tidak didukung hal ini dapat disebabkan karena masih minimnya penerapan sistem pengendalian internal yang baik, jika dilihat dari rata-rata jawaban yang rendah dari responden dalam mengisi kuisisioner penelitian di mana pada OPD Kabupaten Magelang masih rendahnya penilaian secara terus menerus yang dilakukan oleh pimpinan OPD, serta minimnya kegiatan pengelolaan dalam mengurangi resiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi oleh pimpinan. Selain itu komunikasi secara terbuka dan efektif yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat pengawas intern yang bertujuan memberikan masukan masih cukup rendah. Sehingga memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

Nilai Adjusted R Square sebesar 56,9%. Sehingga dapat diartikan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam penelitian ini sebesar 56,9% sedangkan

43,1% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Gumelar (2017) yang membuktikan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

c. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang

Berdasarkan uji yang telah dilaksanakan dapat diketahui bahwa pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Hal ini dapat dilihat dari uji T yang menunjukkan bahwa nilai t hitung sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 5,390 di mana angka tersebut lebih besar dari t tabel yaitu 0,2500 ( $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ), dengan nilai signifikansi 0,000 ( $<0,05$ ), sehingga dapat diketahui bahwa pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Jika dilihat dari nilai koefisien t hitung sebesar 5,390 yang artinya pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena semakin baik pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang

dihasilkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 didukung.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa OPD Kabupaten Magelang telah memanfaatkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan baik dan sesuai dengan prosedur akuntansi. Dilihat dari nilai koefisien beta variabel sistem akuntansi keuangan daerah bernilai positif sebesar 0,730. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Ketika pemanfaatan sistem akuntansi daerah baik, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga baik.

Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Asih & Pratiwi (2021) menyatakan bahwa standar akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Gianyar. Sehingga dapat diketahui bahwa andalnya sistem akuntansi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan akan memperbesar potensi berkualitasnya informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

d. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang

Berdasarkan uji yang telah dilaksanakan dapat diketahui bahwa

implementasi standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji T yang telah dilakukan nilai  $t$  hitung standar akuntansi pemerintahan sebesar 1,427 di mana angka ini lebih besar dari  $t$  tabel yaitu 0,2500 ( $t$  hitung  $>$   $t$  tabel), dengan nilai signifikansi 0,160 ( $>$ 0,05) yang menunjukkan bahwa variabel implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga H4 tidak didukung. Dalam melaksanakan penelitian dengan menyebar kuisisioner, peneliti memberikan arahan kepada setiap OPD mengenai pihak yang mengisi kuisisioner berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. H4 tidak didukung dikarenakan masih minimnya penerapan dan pengetahuan terkait dengan standar akuntansi pemerintahan jika dilihat dari rata-rata jawaban responden yang masih minim dalam hal penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran dengan menggunakan akuntansi berbasis kas. Selain itu pengungkapan informasi konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi yang rendah. Hal tersebut dapat memberikan gambaran bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan yang belum maksimal, dan hal tersebut dapat berakibat pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Jika dilihat nilai koefisien beta variabel standar akuntansi pemerintahan bernilai positif sebesar 0,170. Hal ini menunjukkan hubungan positif antara implementasi standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik penerapan dari standar akuntansi pemerintahan, maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Jika dilihat dari Tabel 4.16 nilai Adjusted R Square sebesar 56,9%. Sehingga dapat diartikan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam penelitian ini sebesar 56,9% sedangkan 43,1% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2018) yang membuktikan bahwa interaksi penerapan SAP yang dimoderas oleh komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait dengan penelitian pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah, dan implementasi standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Kabupaten Magelang, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang.
2. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang.
3. Pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang.
4. Implementasi standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan di atas, maka terdapat beberapa saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang
  - a. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dengan salah satunya dengan memberikan pelatihan, dikarenakan sumber daya manusia merupakan aspek utama dalam pengelolaan laporan keuangan.

- b. Meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal karena hal ini sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
- c. Mempertahankan dan meningkatkan pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dengan baik.
- d. Meningkatkan implementasi standar akuntansi pemerintahan dengan memberikan pengetahuan yang lebih terkait standar tersebut.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang lebih luas dan kemungkinan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. K., Afifudin, & Junaidi. (2018, Agustus). Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *E-JRA, Vol 07 No. 10*, 130-141. Retrieved Agustus 8, 2021, from <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/1472>

Adhitama, S. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan Kompetensi Sumber

Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Akuntansi UNP, Vol 5 No. 2*, 1-22. Retrieved Agustus 8, 2021, from <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2595>

Ardianto, R., & Eforis, C. (2019, Januari). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kab. Tangerang. *Jurnal Bina Akuntansi, Vol 6 No. 1*, 95-136. Retrieved Agustus 8, 2021, from <https://wiyatamandala.ejournal.id/JBA/article/view/44>

Asih, N. K., & Pratiwi, N. P. (2021). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada OPD Kabupaten Gianyar. *Jurnal Hita Akuntansi dan Keuangan*. 581-600. Retrieved Juli 31, 2021, from <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/download/1573/944/>

Asnawi, M., & Pangayow, B. J. (2019, November). Pengaruh Implementasi

- Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Kabupaten Pegunungan Binatang). *Jurnal Akuntansi, Audit, dan Asset, Vol 2 No. 2*, 18-38. Retrieved Agustus 13, 2021, from <http://ejournal.maksi-uncen.ac.id/index.php/maksi/article/view/29>
- BPK RI. (2021, Juli 30). *Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD*. Retrieved from PPID Perwakilan Jawa Tengah: <https://jateng.bpk.go.id/lhp-lkpd/>
- Gumelar, A. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kerinci). *Jurnal Akuntansi UNP, Vol 5 No. 2*. Retrieved Agustus 8, 2021, from <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2586>
- Hendri, M., & NR, E. (2020, Februari). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol 2 No. 1 Seri E*, 2479-2493. Retrieved Juli 31, 2021, from <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/224>
- Ihsanti, E. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota). *Jurnal Akuntansi, Vol 2 No. 2*. Retrieved Agustus 8, 2021, from <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1057>
- Ikyarti, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi, Vol 9 No. 2*, 131-140. Retrieved Juli 31, 2021, from <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/JurnalAkuntansi/article/view/7134>
- Kiranayanti, I. A., & Erawati, N. M. (2016, Agustus). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pemahaman Basis Akrua

- Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 16.2*, 1290-1318. Retrieved Agustus 8, 2021, from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/18075>
- Latifah, A. (2017, Mei). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Bantul). *Repository Universitas PGRI Yogyakarta*. Retrieved Agustus 13, 2021, from <http://repository.upy.ac.id/1339/>
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi, Vol 5 No. 1*. Retrieved Juli 31, 2021, from <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Akuntansi/article/view/500>
- Nadir, R., & Hasyim. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi Empiris di PEMDA Kabupaten Barru). *Akuntabel Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol 14 No. 1*. Retrieved Juli 31, 2021, from <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/1007>
- Ningrum, K. K. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. *Universitas Islam Indonesia*. Retrieved September 17, 2021, from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6473>
- Pavitasari, E. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. *Lumbung Pustaka Universitas Yogyakarta*. Retrieved Agustus 13, 2021, from <https://eprints.uny.ac.id/60422/>
- Pemerintah Kabupaten Magelang. (2020). *Ringkasan APBD Pemerintah Kabupaten Magelang*. Retrieved from APBD 2020: [https://ppid.magelangkab.go.id/download/informasi\\_berkala/apbd%202020.pdf](https://ppid.magelangkab.go.id/download/informasi_berkala/apbd%202020.pdf)
- Pemerintah Kabupaten Magelang. (2021, Juli 31). *Daftar Website SKPD*. Retrieved

- from Website SKPD:  
<https://www.magelangkab.go.id/>
- Pone, S. M. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik (Studi Empiris Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT). *Repository Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*. Retrieved September 17, 2021, from <https://repository.usd.ac.id/31508/>
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal, Vol 6 No. 2*. Retrieved Agustus 8, 2021, from <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/16643>
- Putra, I. P., & Wayan, I. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8.2, 230-244. Retrieved Juli 31, 2021, from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8146>
- Risda, R., Nurwulan, L. L., & Septianisa, L. (2018, Maret). Pengaruh Implementasi SIMDA Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung Barat). *Konferensi Nasional Sistem Informasi STIMK Atma Luhur Pangkal Pinang*. Retrieved Agustus 8, 2021, from [http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file\\_artikel\\_abstrak/Isi\\_Artikel\\_962951346387.pdf](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_962951346387.pdf)
- Suyitno, H. (2020). *Capaian Kinerja Secara Fisik Maupun Keuangan Ternyata Masih Jauh Dari Target*. Kabupaten Magelang: Antaranews.com.
- Triwahyuni, M., Nurazlina, & Silfi, A. (2016, Februari ). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Penerapan Sisten Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Dumai). *JOM Fekon Vol 3 No. 1, Vol 3 No. 1*, 2312-2326. Retrieved Agustus 13, 2021, from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/11889>
- Ulfiati, N. (2017). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Penerapan

- Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Penelitian Pada Pemerintah Kabupaten Tegal). Retrieved Agustus 13, 2021, from <http://eprints.ums.ac.id/49652/29/NASKAH%20PUBLIKASIE.pdf>
- Utama, R. J., Tanjung, A. R., & Sofyan, A. (2017, Februari). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu). *JOM Fekon, Vol 3 No. 1*, 1429-1443. Retrieved Agustus 13, 2021, from <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/827>
- Wati, K. D., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 2 No. 1*. Retrieved Agustus 8, 2021, from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/2972>
- Wulandari, M. (2018). Oengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris SKPD Kabupaten Solok Selatan). *Jurnal Akuntansi UNP, Vol 6 No. 3*. Retrieved Agustus 8, 2021, from <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3846>
- Zulfa, N. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada BPKPAD Kabupaten Demak). *Universitas Wahid Hasyim*. Retrieved September 17, 2021, from <http://eprints.unwahas.ac.id/1615/>
- Zulia, A. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada OPD Kota Salatiga). Retrieved Agustus 13, 2021, from <http://eprintslib.ummgl.ac.id/1742/>
- Asih, N. K., & Pratiwi, N. P. (2021). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pada OPD Kabupaten Gianyar. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 581-600.

*Data Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang*

2021. (2021, Oktober 14). Retrieved from Pusaka Gemilang Diskominfo: <https://pusaka.magelangkab.go.id/penduduk/penduduk/kelamin>

*Kondisi Geografis Kabupaten Magelang.*

(2021, Oktober 14). Retrieved from Web Site Kabupaten Magelang: <http://magelangkab.go.id/images/dokumen/geografis.pdf>

*Sejarah Kabupaten Magelang.* (2021, Oktober

14). Retrieved from Visit Magelang good place good people: <https://visitmagelang.id/sejarah-kabupaten-magelang>

Wahyu, A. T. (2021, Oktober 14). *Peta Jalan*

*Kabupaten* . Retrieved from DPUPR Kabupaten Magelang: <https://dpupr.magelangkab.go.id/home/detail/peta-jalan-kabupaten/76>

*Wikipedia Ensiklopedia Bebas.* (2021,

Oktober 14). Retrieved from

Kabupaten Magelang:

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Magelang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Magelang)

Chaniago, J. (2021, 10 18). *Download R Tabel*

*Lengkap.* Retrieved from wordpress: <https://junaidichaniago.wordpress.com/2010/05/24/download-tabel-r-lengkap/>

Dispace UII. (2021, 10 18). *Tabel Uji F.*

Retrieved from Dispace UII: [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/7943/0840-](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/7943/0840-Lampiran%207%20Tabel%20uji%20F%20dan%20tabel%20uji%20T.pdf?sequence=16&isAllowed=y)

[Lampiran%207%20Tabel%20uji%20F%20dan%20tabel%20uji%20T.pdf?s](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/7943/0840-Lampiran%207%20Tabel%20uji%20F%20dan%20tabel%20uji%20T.pdf?sequence=16&isAllowed=y)